RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2023

Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta

Tahun 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka melakukan perubahan yang mengandung makna adanya kemajuan/perbaikan, pertumbuhan mencapai kondisi yang lebih baik dibanding keadaan sebelumnya. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi, dan politik sampai pada perkembangan adanya penyelarasan dengan konservasi lingkungan. Nilai dalam pembangunan adalah optimalisasi sumberdaya dengan tetap menjaga kesinambungan serta kualitas lingkungan yang baik. Perencanaan Pembangunan Daerah secara umum merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai *stakeholder* pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Pembangunan yang bermakna adalah yang memenuhi unsur kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, dapat menumbuhkan kebanggaan sebagai manusia, dan dapat memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk berpikir, berkembang, berperilaku, dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi empat pendekatan, yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif dan *top-down/bottom up*.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun kedepan yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan Rencana Kerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran

serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu tahun tertentu.

Renja Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2023 - 2026. Renja Tahun 2023 tersebut akan dipergunakan sebagai materi pada pembahasan musrenbang Kota Yogyakarta Tahun 2023 untuk menyusun Rancangan Akhir RKPD Tahun 2023.

Renja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2023 disusun dalam asumsi respon dan pemulihan dari pandemi Covid-19 yang berdampak pada berbagai sektor strategis Kota Yogyakarta. Selain itu, Renja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2023 merupakan tahun pertama periode Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Renja Dinas Perindustrian Kota Yogyakarta Tahun 2023 mendasarkan pada peraturan yang mengkait yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
10. Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);

12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021 – 2041 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 2); dan
13. Peraturan Walikota Yogyakarta No 120 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
14. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 128 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2023 adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki serta memberikan arah pembangunan Kota Yogyakarta untuk tahun 2023 khususnya pada urusan bidang perindustrian, koperasi dan UMKM. Selain itu, juga sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Adapun tujuannya adalah:

1. Pedoman bagi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA Perangkat Daerah) Tahun 2022.
2. Mewujudkan konsistensi atas sinkronisasi perencanaan tahunan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta berdasarkan Renstra dan hasil musrenbang dalam mengaplikasikan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penyusunan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023

Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja dimaksudkan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

Review ini meliputi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahu 2021. Secara rinci review tersebut tergambar selanjutnya pada Tabel 2.1. Yang akan dijelaskan pada bab ini adalah program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan bidang urusan perindustrian, koperasi dan UKM beserta program dan kegiatan penunjang.

Program, kegiatan dan sub kegiatan urusan industry yang dilaksanakan Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2021 antara lain:

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri . Program ini memiliki satu indikator kinerja program yakni Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi, ditargetkan sebesar 3 % dan terealisasi sebesar 6,2 %. Dengan demikian capaian kinerja indikator ini sebesar 206 %.
   1.1. Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kota. Kegiatan tersebut terdiri dari 3 sub kegiatan antara lain :
      a. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota,
      b. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri,
      c. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri.
2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota. Program ini memiliki satu indicator yakni Persentase IKM yang berijin industry,

dengan target 2 % dan terrealisasi sebesar 3,4 %. Dengan demikian capaian kinerja indicator ini sebesar 170 %.

2.1. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI/IPUI/IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Kegiatan ini memiliki satu sub kegiatan yakni

Program, kegiatan dan sub kegiatan urusan koperasi dan UKM yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2021 antara lain :

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi memiliki satu indikator kinerja yakni jumlah koperasi yang memiliki akuntabilitas baik. Target indikator ini pada tahun 2021 sebanyak 115 koperasi dan terealisasi 115 koperasi. Dengan demikian capaian kinerja program ini sebesar 100 %. Capaian kinerja program ini tidak dapat dibandingkan dengan target dan realisasi tahun sebelumnya mengingat indikator kinerja ini baru berlaku tahun 2021.

1.1. Sebagai upaya untuk mencapai target kinerja program ini maka dilaksanakan Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan tersebut terdiri dari :

a) Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota. Sub kegiatan ini memiliki satu output yakni Pengawasan Koperasi, yang menyasar pada 10 koperasi di Kota Yogyakarta. Pengawasan koperasi dilakukan dengan cara pengawasan langsung ke lapangan, pengawasan secara head to head dengan menghadirkan pengurus, pengawas maupun karyawan koperasi

b) Sub Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan

Kabupaten/Kota. Sub Kegiatan ini memiliki tiga output, antara lain :

- Klinik Koperasi Sehat bagi 30 koperasi. Klinik Koperasi Sehat merupakan sarana bagi koperasi untuk berkonsultasi baik langsung maupun tidak langsung. Tujuannya untuk mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh koperasi.
- Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi bagi 15 koperasi. Aktivitas ini merupakan salah satu bentuk pengawasan koperasi. Pemeriksaan dilakukan melalui pengawasan langsung ke lapangan, pengawasan secara head to head dengan menghadirkan pengurus, pengawas maupun karyawan koperasi maupun pengawasan secara khusus terhadap koperasi-koperasi bermasalah yang memerlukan bantuan dari Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta.
- Pemeringkatan Koperasi bagi 115 koperasi. Pemeringkatan koperasi merupakan salah satu bentuk pengawasan koperasi yang bertujuan untuk melihat tingkat kualitas koperasi baik dilihat dari aspek kelembagaan koperasi, usaha koperasi, keuangan koperasi, manfaat koperasi terhadap anggota maupun manfaat koperasi terhadap masyarakat.

2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi memiliki satu indikator kinerja yakni Jumlah koperasi simpan pinjam yang mendapatkan penilaian sehat. Target indikator kinerja ini pada tahun 2021 sebanyak 102 koperasi dan terealisasi 102 koperasi. Dengan demikian capaian kinerja program ini sebesar 100 %.

   2.1. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wialayah Keanggotaannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini terdiri dari dua sub kegiatan antara lain:

   a) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota. Sub kegiatan ini

memiliki satu output yakni Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang menyasar 75 koperasi. Penilaian kesehatan koperasi ini dilakukan terhadap koperasi simpan pinjam karena meskipun dana simpan pinjam berasal dari anggota koperasi kegiatan menghimpun dana masyarakat harus dikelola secara baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Sub Kegiatan Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.

3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian memiliki satu indikator kinerja program yakni Jumlah SDM Koperasi yang memiliki kompetensi. Target indikator kinerja ini pada tahun 2021 sebanyak 465 orang dan terealisasi 465 orang. Dengan demikian capaian kinerja program ini sebesar 100 %.

3.1. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan tersebut terdiri dari satu sub kegiatan yakni:

a) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi. Sub kegiatan ini memiliki dua output antara lain :

- Bimtek bagi SDM Koperasi yang ditujukan bagi 100 orang perwakilan koperasi. Bimtek yang dilaksanakan terdiri dari DIklat dan Sertifikasi Uji Kompetensi Analis Pinjaman sebanyak 1 kali, Bimtek Perijinan Berbasis Risiko sebanyak 2 kali dan Bimtek Pengesahan Koperasi via AHU Online sebanyak 2 kali.
- Pelatihan Motivasi Teknis Pengelolaan BUKP dan Pembinaan UMKM, terdiri dari Pelatihan Teknis Pengeloaan BUKP dan Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran BUKP Tahun 2022.

4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi memiliki satu indikator kinerja program yakni jumlah koperasi yang berkembang

usahanya. Target indikator ini pada tahun 2021 adalah 10 koperasi dan terealisasi 10 koperasi.

4.1. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini terdiri dari satu sub kegiatan yakni Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota. Sub kegiatan ini memiliki 4 output antara lain :

- Gelar Potensi Koperasi, merupakan ajang untuk memamerkan produk-produk koperasi. Tahun 2021 dilaksanakan Pameran Jogja SMEITT 2021 di JCM dan Jogja Expo 2021 di Malioboro Mall
- Kelompok koperasi yang dibina dengan target 24 koperasi. Pembinaan kelembagaan koperasi mendorong penumbuhan gerakan masyarakat untuk berkoperasi. Tahun 2021 dilakukan Peningkatan Kelembagaan Kelompok Pra Koperasi Reguler kepada 10 Kelompok dan ditindaklanjuti dengan Penilaian Kelompok Pra Koperasi kepada 14 Kelompok
- Monitoring dan Evaluasi Dana Bergulir, pada tahun 2021 telah dilaksanakan Monev Dana Bergulir APBN, APBD, MKPL dan Monev BUKP. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan dana bergulir dan permasalahan yang dihadapi.
- Rangkaian Hari Koperasi. Dalam rangka memperingati Hari Koperasi 2021 telah dilaksanakan Penilaian Kepatuhan Pelaporan Koperasi (Badan Hukum Kota dan Kantor Cabang), Lomba Tangkas Terampil Perkoperasian, Workshop/Sarasehan Hari Koperasi dan Prambanan Java Festival 2021.

Sedangkan program dan kegiatan penunjang yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2021 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dari target fisik renja sebesar 100%, berhasil direalisasikan sebesar 100%. Terdapat 5 (lima) kegiatan di dalam program tersebut, dengan masing-masing realisasinya mencapai 100%. Lima kegiatan tersebut antara lain:
   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, antara lain :
      - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Sub kegiatan ini memiliki 4 (empat) output, yaitu :
        1) Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021 sebanyak 2 dokumen
        2) Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
      - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD, memiliki 1 (satu) output yakni Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2022, RKPA dan DPPA Tahun 2021
      - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Sub kegiatan ini memiliki 6 (enam) output, antara lain :
        1) Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD
        2) Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD
        3) Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
        4) Pengelolaan Website OPD
        5) Penyusunan Buku Profil OPD
        6) Perjanjian Kinerja dan Perubahannya
   b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, antara lain :
      - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Terdapat 2 (dua) output pada sub kegiatan ini, yaitu :
        1) Gaji dan Tunjangan ASN
        2) Tambahan Penghasilan Pegawai

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD. Output pada sub kegiatan ini adalah Laporan Keuangan Akhir Tahun.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran. Output sub kegiatan ini adalah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran.

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Kegiatan ini terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan, yakni :
   - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Output kegiatan ini adalah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia (3 jenis).
   - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Sub kegiatan ini memiliki 6 (enam) output, antara lain :
     1) Alat tulis kantor yang tersedia (56 jenis)
     2) Bahan dan peralatan rumah tangga (20 jenis)
     3) Pengadaan Komputer PC (2 unit)
     4) Pengadaan Laptop (3 unit)
     5) Pengadaan Printer (5 unit)
     6) Pengadaan Scanner (1 unit)
   - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Output sub kegiatan ini adalah barang cetakan (6 jenis) dan penggandaan surat-surat/dokumen (53.135 lembar)
   - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. Output sub kegiatan ini adalah surat kabar yang tersedia (12 bulan)
   - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Output sub kegiatan ini adalah makan minum rapat yang tersedia (21 kali) dan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang terlaksana (9 kali).

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yakni :
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Output sub kegiatan ini adalah buku cek yang tersedia (2 buku) dan materai yang tersedia (135 lembar).

- Sub Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Output sub kegiatan ini adalah pembayaran rekening telepon selama 12 bulan.
- Sub Kegiatan Jasa Pelayanan umum Kantor. Sub kegiatan ini memiliki 7 (tujuh) output, antara lain :
  1) Jasa keamanan Griya UMKM (12 bulan)
  2) Jasa pemeliharaan kebersihan kantor Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM (12 bulan)
  3) Jasa pemeliharaan kebersihan kantor Griya UMKM (12 bulan)
  4) Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerja/kerumahtanggaan (12 bulan)
  5) Retribusi kebersihan (12 bulan)
  6) Tenaga Bantuan (2 orang)
  7) Tenaga Teknis (3 orang)

e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, antara lain :
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.Output sub kegiatan ini adalah pembayaran pajak kendaraan dinas (28 unit) dan pemeliharaan kendaraan dinas (28 unit).
   - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Output sub kegiatan ini adalah Gedung Griya UMKM dan Gedung kantor Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM masing-masing sebanyak 1 unit.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan capaian kinerja pelayanan bidang perindustrian, koperasi dan UMKM telah melampaui yang ditargetkan.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2021

Kota Yogyakarta

NAMA SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2021		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2021		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2021							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	(Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan) : Jumlah Kegiatan x 100%		431,335,000		306,238,000		1,507,753,195	100.00%	1,507,753,195	100.00%	1,444,703,584	100.00%	95.82%					Sekretaris	
			Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	(Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan) : Jumlah Kegiatan x 100%	100		100		100		100.00%		100.00%		1.00%	0.00%					Sekretaris	
			Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	(Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan) : Jumlah Kegiatan x 100%	100		100		100		100.00%		100.00%		1.00%	0.00%					Sekretaris	
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								2,560,000	100.00%	2,560,000	100.00%	2,479,000	100.00%	96.84%			0.00%	0.00%		
			Dokumen RenjaTahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah		0 Berita Acara		0 Berita Acara		1 Berita Acara		100.00%		100.00%		100.00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								2,000,000	100.00%	2,000,000	100.00%	2,000,000	100.00%	100.00%			0.00%	0.00%		
			Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2022, RKPA dan DPPA Tahun 2021		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
		3 Koordinasi dan Penyusunan								4,000,000	100.00%	4,000,000	100.00%	4,000,000	100.00%	100.00%			0.00%	0.00%		

			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		6 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
				Dokumen Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Hasil Renstra OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%							
				Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LKjiP 2020 dan Rancangan LKjiP 2021)		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%							
				Pengelolaan Website		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100.00%		100.00%		100.00%							
				Penyusunan Buku Profil OPD		0 Buku		0 Buku		1 Buku		100.00%		100.00%		100.00%							
				Perjanjian Kinerja dan perubahannya		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%							
		4	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**								**300,000**	**100.00%**	**300,000**	**100.00%**	**300,000**	**100.00%**	**100.00%**			**0.00%**	**0.00%**		
				Laporan Keuangan Akhir Tahun		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
		5	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD**								**1,500,000**	**100.00%**	**1,500,000**	**100.00%**	**1,500,000**	**100.00%**	**100.00%**			**0.00%**	**0.00%**		
				Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
		6	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**								**2,935,750**	**100.00%**	**2,935,750**	**100.00%**	**2,935,750**	**100.00%**	**100.00%**			**0.00%**	**0.00%**		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Kantor		0 Jenis		0 Jenis		3 Jenis		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
		7	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**								**166,103,445**	**100.00%**	**166,103,445**	**100.00%**	**153,984,060**	**100.00%**	**92.70%**			**0.00%**	**0.00%**		
				Alat Tulis Kantor		0 Jenis		0 Jenis		56 Jenis		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
				Bahan dan Peralatan Rumah Tangga		0 Jenis		0 Jenis		21 Jenis		100.00%		100.00%		100.00%							
				Pengadaan Komputer		0 unit		0 unit		6 unit		100.00%		100.00%		100.00%							
				Pengadaan Scanner		0 unit		0 unit		1 unit		100.00%		100.00%		100.00%							
		8	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**								**18,987,000**	**100.00%**	**18,987,000**	**100.00%**	**18,987,000**	**100.00%**	**100.00%**			**0.00%**	**0.00%**		
				Barang Cetakan		0 Jenis		0 Jenis		6 Jenis		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
				Penggandaan Surat - surat / Dokumen		0 Lembar		0 Lembar		53135 Lembar		100.00%		100.00%		100.00%							
		9	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**								**1,920,000**	**100.00%**	**1,920,000**	**100.00%**	**1,920,000**	**100.00%**	**100.00%**			**0.00%**	**0.00%**		
				Surat Kabar selama 12 bulan		0 Jenis		0 Jenis		2 Jenis		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		

		10	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**							**19,190,000**	**100.00%**	**19,190,000**	**92.03%**	**17,507,001**	**92.03%**	**91.23%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Makan Minum Rapat		0 Kali		0 Kali		21 Kali		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar daerah		0 Kali		0 Kali		9 Kali		100.00%		85.00%		85.00%							
		11	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**							**1,850,000**	**100.00%**	**1,850,000**	**86.49%**	**1,600,000**	**86.49%**	**86.49%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Buku Cek		0 Buku		0 Buku		2 Buku		100.00%		50.00%		50.00%			0		0.00%		
			Materai		0 Lembar		0 Lembar		135 Lembar		100.00%		100.00%		100.00%							
		12	**Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik**							**5,550,000**	**100.00%**	**5,550,000**	**100.00%**	**2,550,021**	**100.00%**	**45.95%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Pembayaran Rekening Telepon		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
		13	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**							**503,928,280**	**99.99%**	**503,928,280**	**99.99%**	**491,415,585**	**100.00%**	**97.52%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Jasa Keamanan Griya UMKM		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
			Jasa Pemeliharaan Kebersihan Kantor Dinas Perindustrian Koperasi UKM		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100.00%		100.00%		100.00%							
			Jasa Pemeliharaan Kebersihan Kantor Griya UMKM		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100.00%		100.00%		100.00%							
			Jasa Pemeliharaan, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor / Kerja / Kerumahtanggaan		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100.00%		100.00%		100.00%							
			Retribusi Kebersihan (Dinas PerinkopUKM, Griya UMKM)		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100.00%		100.00%		100.00%							
			Tenaga Bantuan		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100.00%		100.00%		100.00%							
			Tenaga Teknis		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100.00%		100.00%		100.00%							
		14	**Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**							**133,031,720**	**100.00%**	**133,031,720**	**100.00%**	**103,581,750**	**100.00%**	**77.86%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas		0 Unit		0 Unit		21 Unit		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas		0 Unit		0 Unit		21 Unit		100.00%		100.00%		100.00%							
		15	**Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**							**238,787,000**	**100.00%**	**238,787,000**	**100.00%**	**238,032,000**	**100.00%**	**99.68%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Gedung Kantor Dinas Perindustrian Koperasi UKM		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
			Gedung Griya UMKM		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100.00%		100.00%		100.00%							
		16	**Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD**			**431,335,000**		**306,238,000**		**405,110,000**	**100.00%**	**405,110,000**	**100.00%**	**401,911,417**	**100.00%**	**99.21%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Layanan UPT Logam		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		

		Upt Logam	Pemeliharaan Gedung UPT Logam		12 Paket		12 Paket		1 Paket		100.00%		100.00%		100.00%								
			Pengadaan Alat-Alat Pendukung Pelayanan UPT Logam		54 Jenis		1 Jenis		54 Jenis		100.00%		100.00%		100.00%								
Rata-rata capaian kinerja															**98.66%**	**92.97%**			**0.00%**	**0.00%**			
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**			
	Kesejahteraan anggota koperasi meningkat	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Jumlah koperasi yang memiliki akuntabilitas baik**	**umlah koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), empunyai Standar Operasional Prosedure (SOP) dan Standar Operasional Manajemen (SOM) tahun n**	**115 Koperasi**	**0**		**0**	**115 Koperasi**	**169,764,960**	**115.00%**	**169,764,960**	**115.00%**	**169,653,230**	**100.00%**	**99.93%**					**Kepala Bidang Koperasi**	
		1 Pengawasan KekuatanKesehatanKemandirianKetangguhanserta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota								**38,577,200**	**100.00%**	**38,577,200**	**100.00%**	**38,577,200**	**100.00%**	**100.00%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Pengawasan Koperasi		0 koperasi		0 koperasi		10 koperasi		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
		2 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota								**131,187,760**	**100.00%**	**131,187,760**	**100.00%**	**131,076,030**	**100.00%**	**99.91%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Klinik Koperasi Sehat		0 Koperasi		0 Koperasi		30 Koperasi		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
			Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi		0 Koperasi		0 Koperasi		15 Koperasi		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pemeringkatan Koperasi		0 Koperasi		0 Koperasi		115 Koperasi		100.00%		100.00%		100.00%							
Rata-rata capaian kinerja															**100.00%**	**99.96%**			**0.00%**	**0.00%**			
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**			
	Kesejahteraan anggota koperasi meningkat	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Jumlah koperasi simpan pinjam yang mendapatkan penilaian sehat**	**Jumlah koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian kesehatan kategori sehat tahun n**	**105 Koperasi**	**0**		**0**	**102 Koperasi**	**65,845,400**	**115.00%**	**65,845,400**	**115.00%**	**65,755,300**	**100.00%**	**99.86%**					**Kepala Bidang Koperasi**	
		1 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota								**9,833,400**	**100.00%**	**9,833,400**	**100.00%**	**9,768,800**	**100.00%**	**99.34%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Koperasi		0 Koperasi		75 Koperasi		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		

		2 Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota								56,012,000	100.00%	56,012,000	100.00%	55,986,500	100.00%	99.95%			0.00%	0.00%		
			Penilaian Koperasi berprestasi		0 Koperasi		0 Koperasi		20 Koperasi		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
Rata-rata capaian kinerja															100.00%	99.65%			0.00%	0.00%		
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	Kesejahteraan anggota koperasi meningkat	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah SDM Koperasi yang memiliki kompetensi	Jumlah SDM Koperasi yang memiliki kompetensi s.d tahun n	565 Orang	0		0	465 Orang	346,953,890	465.00%	346,953,890	465.00%	345,683,800	100.00%	99.63%					Kepala Bidang Koperasi	
		1 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi								346,953,890	100.00%	346,953,890	100.00%	345,683,800	100.00%	99.63%			0.00%	0.00%		
			Bimtek bagi SDM Koperasi		0 Koperasi		0 Koperasi		100 Koperasi		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
			Pelatihan Motivasi Teknis Pengelolaan BUKP dan Pembinaan UMKM (anggota BUKP)		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100.00%		100.00%		100.00%							
Rata-rata capaian kinerja															100.00%	99.63%			0.00%	0.00%		
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	Kesejahteraan anggota koperasi meningkat	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah koperasi yang berkembang usahanya	Jumlah koperasi yang volume usahanya meningkat	15 Unit	0		0	10 Unit	377,593,150	10.00%	377,593,150	10.00%	369,781,220	100.00%	97.93%					Kepala Bidang Koperasi	
			Jumlah koperasi yang berkembang usahanya	Jumlah koperasi yang volume usahanya meningkat					10		10.00%		10.00%		1.00%	0.00%						
		1 Pemberdayaan Peningkatan ProduktivitasNilai TambahAkses PasarAkses PembiayaanPengguatan KelembagaanPenataan ManajemenStandarisasidan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota								377,593,150	100.00%	377,593,150	100.00%	369,781,220	100.00%	97.93%			0.00%	0.00%		
			Gelar Potensi Koperasi		0 Koperasi		0 Koperasi		6 Koperasi		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
			Kelompok koperasi yang dibina		0 Koperasi		0 Koperasi		24 Koperasi		100.00%		100.00%		100.00%							
			Monitoring dan evaluasi dana bergulir		0 Kali		0 Kali		11 Kali		100.00%		100.00%		100.00%							
			Rangkaian Hari Koperasi		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100.00%		100.00%		100.00%							

Rata-rata capaian kinerja															100.00%	97.93%			0.00%	0.00%		
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	Kesejahteraan pelaku UKM meningkat	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAHUSAHA KECILDAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan	Jumlah wirausaha baru tahun n	100 Orang	0		0	100 Orang	559,527,000	100.00%	559,527,000	100.00%	548,682,800	100.00%	98.06%					Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil	
			Jumlah UKM ber-IUM	Jumlah UKM yang mempunyai IUM tahun n	400		null		400		400.00%		400.00%		1.00%	0.00%					Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil	
		1 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro								116,600,000	100.00%	116,600,000	100.00%	114,998,000	100.00%	98.63%			0.00%	0.00%		
			Data pelaku UMKM		0 UMKM		0 UMKM		1350 UMKM		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
		2 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro								22,950,000	100.00%	22,950,000	100.00%	22,665,000	100.00%	98.76%			0.00%	0.00%		
			Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kemudahan perizinan usaha		0 UMKM		0 UMKM		120 UMKM		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
		3 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro								419,977,000	100.00%	419,977,000	100.00%	411,019,800	100.00%	97.87%			0.00%	0.00%		
			Pemberdayaan wirausaha baru dan peningkatan kapasitas kelompok gandeng gendong		0 UMKM		0 UMKM		100 UMKM		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
Rata-rata capaian kinerja															100.00%	98.42%			0.00%	0.00%		
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	Kesejahteraan pelaku UKM meningkat	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UKM Mandiri	Jumlah UKM yang mendapatkan intervensi pelatihan lanjutan, pameran, pendampingan dan kenaikan omset	30 UKM	0		0	30 UKM	590,214,694	30.00%	590,214,694	30.00%	585,899,755	100.00%	99.27%					Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil	
			Jumlah UKM Mandiri	Jumlah UKM yang mendapatkan intervensi pelatihan lanjutan, pameran, pendampingan dan kenaikan omset					30		30.00%		30.00%		1.00%	0.00%						
			Jumlah IKM Mandiri	Jumlah IKM yang mendapatkan intervensi pelatihan lanjutan, pameran, pendampingan dan	240				140		140.00%		149.00%		1.06%	0.00%					Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil	

				inovasi																			
			Pendapatan UPT Logam	Pendapatan UPT Logam tahun n	583150000		324574256		405110000		40511000 0.00%		441253741. 00%		1.09%	0.00%					Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil	
		1 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan PengolahanPemasaranSDMserta Desain dan Teknologi								590,214,694	100.00%	590,214,694	100.00%	585,899,755	100.00%	99.27%			0.00%	0.00%		
			Kemitraan dengan Lembaga Pemerintah/Lembaga Swasta		0 lembaga		0 lembaga		4 lembaga		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
			Pameran dan promosi produk UMK		0 kali		0 kali		2 kali		100.00%		100.00%		100.00%							
			Kerjasama dan Promosi UMKM dengan Media Elektronik dan Media Cetak		0 Pemberitaan		0 Pemberitaan		4 Pemberitaan		100.00%		100.00%		100.00%							
Rata-rata capaian kinerja															100.00%	99.27%			0.00%	0.00%		
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		

	Kinerja sektor industri meningkat	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi	(IKM yang memiliki produk dan jasa terstandarisasi / total jumlah IKM Kota Yogyakarta) x 100 %	3%	1,670,683,600		1,290,440,343	3%	3,567,756,097	3 %	3,567,756,097	6.2 %	3,474,863,630	206.67%	97.40%					Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil	
			Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi	(IKM yang memiliki produk dan jasa terstandarisasi / total jumlah IKM Kota Yogyakarta) x 100%					5		3 %		6.22 %		2.07%	0.00%					Kepala UPT Logam	
		1 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota								35,750,000	100.00%	35,750,000	40.13%	14,341,000	40.13%	40.11%			0.00%	0.00%		
			Dokumen FGD RPIK Yogyakarta		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100.00%		40.13%		40.13%			0		0.00%		
		2 KoordinasiSinkronisasidan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan PengembanganPenyebaran dan Perwilayahan Industri								284,269,000	100.00%	284,269,000	100.00%	267,448,945	100.00%	94.08%			0.00%	0.00%		
			Koordinasi terkait pengembangan sentra melalui kegiatan penyuluhan di sentra IKM		0 IKM		0 IKM		500 IKM		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
			Dokumen Amdal Lalin		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%							
			Dokumen UKL/UPL/Amdal		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%							
		3 KoordinasiSinkronisasidan				1,670,683,600		1,290,440,343		1,858,723,677	100.00%	1,858,723,677	100.00%	1,825,636,265	100.00%	98.22%			0.00%	0.00%		

		pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Upt Logam	Kerjasama dengan industri dalam rangka pelibatan dalam jejaring rantai pasok industri nasional		2 Kerjasama		2 Kerjasama		2 Kerjasama		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
			Optimalisasi Layanan UPT Logam		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pemeliharaan Gedung dan Peralatan Mesin UPT Logam		12 Bulan		25 Bulan		12 Bulan		100.00%		100.00%		100.00%							
			Penataan Sumber Daya Manusia dan Kapasitas Organisasi UPT Logam		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pengadaan Kipas Angin		4 Unit		0 Unit		4 Unit		100.00%		100.00%		100.00%							
		4 KoordinasiSinkronisasidan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri								1,389,013,420	99.99%	1,389,013,420	99.99%	1,367,437,420	100.00%	98.45%			0.00%	0.00%		
			Pelatihan Bimbingan Teknis IKM		0 IKM		0 IKM		80 IKM		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
			Pelatihan Bimbingan Sarana Produksi IKM		0 IKM		0 IKM		280 IKM		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pendampingan HKI		0 Lokasi		0 Lokasi		14 Lokasi		100.00%		100.00%		100.00%							
			Fasilitasi Dekranasda		#############		########### #####		########### ####		100.00%		100.00%		100.00%							
			Monev IKM dalam Kelompok PEW		0 IKM		0 IKM		540 IKM		100.00%		100.00%		100.00%							
Rata-rata capaian kinerja															85.03%	82.72%			0.00%	0.00%		
Predikat kinerja															Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		

	Pertumbuhan Ekonomi Meningkat	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase IKM yang berijin industri	(Jumlah IKM yang berizin industri / total jumlah IKM Kota Yogyakarta) x 100 %	2%	0		0	2%	134,727,500	1.60 %	134,727,500	3.41 %	134,720,000	213.13%	99.99%					Kepala Bidang Industri	
		1 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUIIPUIIUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINasyang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan								134,727,500	100.00%	134,727,500	100.00%	134,720,000	100.00%	99.99%			0.00%	0.00%		
			Fasilitasi IUI bagi Kota Yogyakarta, Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kemudahan perizinan		0 IKM		0 IKM		300 IKM		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		

		Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																				
Rata-rata capaian kinerja															100.00%	99.99%			0.00%	0.00%		
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	Pertumbuhan Ekonomi Meningkat	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Data Informasi Industri yang ter-update	(Data IKM yang ter-update) / Total Data IKM) x 100%	100%	0		0	100%	82,123,750	100%	82,123,750	100.2 %	82,075,000	100.20%	99.94%					Kepala Bidang Industri	
		1 DiseminasiPublikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas								82,123,750	100.00%	82,123,750	100.00%	82,075,000	100.00%	99.94%			0.00%	0.00%		
			Tersedianya IKM Kota Yogyakarta untuk Mendukung SIINas		0 IKM		0 IKM		2000 IKM		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
Rata-rata capaian kinerja															100.00%	99.94%			0.00%	0.00%		
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Total anggaran dari seluruh program										7,402,259,636		7,402,259,636		7,221,818,319								
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 10) (%)															97.46%	97.56%			0.00%	0.00%		
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 10)															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisa kinerja pelayanan Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2021 didasarkan pada review evaluasi pelaksanaan Renstra OPD. Secara umum, capaian kinerja bidang perindustrian, koperasi dan UKM sangat baik. Hal ini merujuk pada capaian kinerja yang melebihi target yang telah ditetapkan.

Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memiliki dua sasaran dengan tiga indikator kinerja. Tolok ukur capaian sasaran Kesejahteraan Anggota Koperasi dan Pelaku UKM Meningkat diukur dengan dua indikator. Indikator tersebut yaitu indikator: Nilai omset koperasi dan Nilai omset UKM Usaha Mikro.

Nilai omset koperasi pada tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp 403.950.000.000,- dan terealisasi Rp 389.328.164.538,- sehingga didapat capaian kinerja sebesar 96,38 %. Tahun sebelumnya, target nilai omset koperasi sebesar Rp 403.946.699.700 ,- dan realisasinya sebesar Rp 444.606.264.459,- atau dengan tingkat capaian kinerja 110,07 %. Dengan demikian, realisasi dan tingkat capaian kinerja indikator nilai omset koperasi tahun 2021 turun dibanding tahun 2020. Realisasi nilai omset koperasi tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 55.278.099.921 atau 12,43 % dibanding tahun 2020. Tidak tercapainya target tahun 2021 disebabkan pada tahun 2021 tidak seluruh koperasi melakukan RAT (Rapat Anggota Tahunan) sehingga omset koperasi tidak ter-update. Selain itu terdapat Sembilan koperasi yang berpindah menjadi binaan Dinas Koperasi DIY.

Indikator kedua pada sasaran kesejahteraan anggota koperasi dan pelaku UKM meningkat adalah nilai omset UKM usaha mikro. Tahun 2021 indikator kinerja nilai omset UKM usaha mikro ditetapkan sebesar Rp 4.969.866.917 dan terealisasi sebesar Rp 5.103.000.000 dengan demikian capaian kinerja indikator tersebut sebesar 102,67 %. Tahun sebelumnya, realisasi indikator kinerja omset UKM usaha mikro sebesar Rp 3.795.713.382. Jumlah tersebut diatas dari target yang ditetapkan sebesar Rp 2.300.864.313. Persentase capaian kinerja tersebut sebesar 164,97 %. Dengan demikian realisasi indikator kinerja nilai omset UKM usaha mikro mengalami peningkatan. Realisasi nilai omset UKM usaha mikro tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp 1.307.296.618. Namun tingkat capaian kinerja indikator nilai omset UKM usaha mikro tahun 2021 turun dibanding tahun 2020, semula 164,97 % menjadi 102,67 %. Meski demikian, capaian kinerja tersebut masih dalam kriteria diatas sangat baik, mengingat capaiannya melampaui target yang telah ditetapkan.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM

Kota Yogyakarta

No	Indikator	SPM/ Target Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	Nilai omset koperasi	-	-	403,950,000,000	397,114,727,829	397,114,727,829	405,057,022,385	389,328,164,538	389,328,164,538	408,794,572,765	428,260,980,992	
2	Nilai omset UKM Usaha Mikro	-	-	4,969,866,917	4,969,866,917	5,040,000,000	5,760,000,000	5,103,000,000	5,103,000,000	5,358,150,000	5,613,300,000	
3	Nilai omset IKM	-	-	124,377,964	136,455,064	-	-	1,241,421,600	1,241,421,600	-	-	Capaian indikator ini telah jauh melampaui target. Oleh karenanya, relevan untuk diterapkan indikator kinerja baru
4	Jumlah Tenaga Kerja IKM	-	-	-	-	16,425	18,718	-	-	16,425	18,718	Indikator kinerja ini merupakan indikator baru. Melihat keberhasilan pada indikator sebelumnya, maka target indikator baru optimis dapat tercapai

5	Nilai investasi IKM	-	-	-	-	15,948,506,955	19,165,867,834	-	-	15,948,506,955	19,165,867,834	Indikator kinerja ini merupakan indikator baru. Melihat keberhasilan pada indikator sebelumnya, maka target indikator baru optimis dapat tercapai

Realisasi kinerja sasaran Kesejahteraan anggota koperasi dan UKM meningkat tahun 2021 pada indikator nilai omset koperasi mendekati target akhir jangka menengah renstra. Pada akhir periode renstra tahun 2022, nilai omset koperasi ditarget sebesar Rp 406.366.988.994. Sedangkan realisasi tahun 2021 sebesar 389.328.161.538 atau 95,81 % dari target akhir renstra tahun 2022 (tabel 3.10). Dengan demikian, target akhir renstra optimis dapat tercapai.

Dapat disimpulkan bahwa kinerja sasaran kesejahteraan anggota koperasi dan UKM Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta tahun 2021 berhasil karena capaian indikator sasaran berupa nilai omset koperasi dan nilai omset UKM usaha mikro membukukan kriteria kinerja sangat baik dan diatas sangat baik.

Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja sasaran kesejahteraan anggota koperasi dan pelaku UKM meningkat, antara lain :

1. Dilaksanakannya pelatihan peningkatan kapasitas bagi sumber daya manusia koperasi. Kegiatan peningkatan kapasitas SDM koperasi dilakukan melalui pelatihan yang bertumpu pada praktek langsung. Setlah dilakukan pelatihan, ditindaklanjuti dnegan pendampingan oleh tenaga pendamping. Pengurus dan atau anggota koperasi dapat berkonsultasi dengan tenaga pendamping terkait permasalahan yang dihadapi untuk menemukan solusi. Permasalahan yang umumnya dihadapi oleh koperasi antara lain bagaimana meningkatkan peran anggota koperasi, bagaimana cara memperkuat permodalan dan lain sebagainya.
2. Tersedianya sarana bagi koperasi untuk berkonsultasi baik secara langsung datang ke Dinas maupun secara tidak langsung melalui klinik koperasi sehat dan pendampingan. Sarana konsultasi ini memudahkan koperasi mendapatkan solusi atas permasalahan yang ada baik terkait kelembagaan maupun usaha koperasi.
3. Adanya sinergitas yang baik antara pemangku kepentingan koperasi. Sinergitas antara para pemangku kepentingan koperasi seperti Dekopinda, Absindo dan Forum Komunikasi Koperasi se-Kota Yogyakarta mempermudah Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan sehingga tujuan menjadikan koperasi maju berkembang dimanfaatkan oleh seluruh anggota dapat tercapai.
4. Adanya pameran-pameran UMKM dan Koperasi baik yang diselenggarakan secara online maupun ofline yang mampu meningkatkan omset dan menambah relasi usaha dari luar Kota Yogyakarta.

5. Pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan bagi pelaku usaha mikro misalnya pelatihan pemasaran / *marketing*, pelatihan kemasan produk, dan pelatihan pengelolaan manajemen usaha dapat meningkatkan kualitas produk dan pemasarannya sehingga berimbas pada peningkatan omset.

Ada enam program teknis yang menunjang keberhasilan kinerja sasaran kesejahteraan anggota koperasi dan pelaku UKM meningkat. Empat program mendukung pencapaian indikator nilai omset koperasi, yaitu Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dan Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi. Dua program mendukung pencapaian indikator kinerja nilai omset UMK Usaha Mikro, yaitu Program Pemberdayaan UMKM dan Program Pengembangan UMKM.

Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi memiliki satu indikator kinerja yakni jumlah koperasi yang memiliki akuntabilitas baik. Target indikator ini pada tahun 2021 sebanyak 115 koperasi dan terealisasi 115 koperasi. Dengan demikian capaian kinerja program ini sebesar 100 %. Capaian kinerja program ini tidak dapat dibandingkan dengan target dan realisasi tahun sebelumnya mengingat indikator kinerja ini baru berlaku tahun 2021. Sebagai upaya untuk mencapai target kinerja program ini maka dilaksanakan Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan tersebut terdiri dari Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kabupaten/Kota. Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota memiliki satu output yakni Pengawasan Koperasi, yang menyasar pada 10 koperasi di Kota Yogyakarta. Pengawasan koperasi dilakukan dengan cara pengawasan langsung ke lapangan, pengawasan secara head to head dengan menghadirkan pengurus, pengawas maupun karyawan koperasi

Sub Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi memiliki tiga output, antara lain :

1. Klinik Koperasi Sehat bagi 30 koperasi. Klinik Koperasi Sehat merupakan sarana bagi koperasi untuk berkonsultasi baik langsung maupun tidak langsung. Tujuannya untuk mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh koperasi.

2. Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi bagi 15 koperasi. Aktivitas ini merupakan salah satu bentuk pengawasan koperasi. Pemeriksaan dilakukan melalui pengawasan langsung ke lapangan, pengawasan secara head to head dengan menghadirkan pengurus, pengawas maupun karyawan koperasi maupun pengawasan secara khusus terhadap koperasi-koperasi bermasalah yang memerlukan bantuan dari Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta.
3. Pemeringkatan Koperasi bagi 115 koperasi. Pemeringkatan koperasi merupakan salah satu bentuk pengawasan koperasi yang bertujuan untuk melihat tingkat kualitas koperasi baik dilihat dari aspek kelembagaan koperasi, usaha koperasi, keuangan koperasi, manfaat koperasi terhadap anggota maupun manfaat koperasi terhadap masyarakat.

Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi memiliki satu indikator kinerja yakni Jumlah koperasi simpan pinjam yang mendapatkan penilaian sehat. Target indikator kinerja ini pada tahun 2021 sebanyak 102 koperasi dan terealisasi 102 koperasi. Dengan demikian capaian kinerja program ini sebesar 100 %. Untuk mencapai target kinerja program ini, dilaksanakan satu kegiatan yakni Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wialayah Keanggotaannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari dua sub kegiatan antara lain Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota. Sub kegiatan ini memiliki satu output yakni Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang menyasar 75 koperasi. Penilaian kesehatan koperasi ini dilakukan terhadap koperasi simpan pinjam karena meskipun dana simpan pinjam berasal dari anggota koperasi kegiatan menghimpun dana masyarakat harus dikelola secara baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian memiliki satu indikator kinerja program yakni Jumlah SDM Koperasi yang memiliki kompetensi. Target indikator kinerja ini pada tahun 202 sebanyak 465 orang dan terealisasi 465 orang. Dengan demikian capaian kinerja program ini sebesar 100 %. Untuk memenuhi indikator kinerja program ini dilaksanakan Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan tersebut terdiri dari satu sub kegiatan yakni

Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi. Sub kegiatan ini memiliki dua output antara lain :

1. Bimtek bagi SDM Koperasi yang ditujukan bagi 100 orang perwakilan koperasi. Bimtek yang dilaksanakan terdiri dari DIklat dan Sertifikasi Uji Kompetensi Analis Pinjaman sebanyak 1 kali, Bimtek Perijinan Berbasis Risiko sebanyak 2 kali dan Bimtek Pengesahan Koperasi via AHU Online sebanyak 2 kali.
2. Pelatihan Motivasi Teknis Pengelolaan BUKP dan Pembinaan UMKM, terdiri dari Pelatihan Teknis Pengeloaan BUKP dan Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran BUKP Tahun 2022.

Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi memiliki satu indikator kinerja program yakni jumlah koperasi yang berkembang usahanya. Target indikator ini pada tahun 2021 adalah 10 koperasi dan terealisasi 10 koperasi. Untuk memenuhi indikator kinerja program ini dilaksanakan satu kegiatan yakni Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini terdiri dari satu sub kegiatan yakni Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota. Sub kegiatan ini memiliki 4 output antara lain :

1. Gelar Potensi Koperasi, merupakan ajang untuk memamerkan produk-produk koperasi. Tahun 2021 dilaksanakan Pameran Jogja SMEITT 2021 di JCM dan Jogja Expo 2021 di Malioboro Mall
2. Kelompok koperasi yang dibina dengan target 24 koperasi. Pembinaan kelembagaan koperasi mendorong penumbuhan gerakan masyarakat untuk berkoperasi. Tahun 2021 dilakukan Peningkatan Kelembagaan Kelompok Pra Koperasi Reguler kepada 10 Kelompok dan ditindaklanjuti dengan Penilaian Kelompok Pra Koperasi kepada 14 Kelompok
3. Monitoring dan Evaluasi Dana Bergulir, pada tahun 2021 telah dilaksanakan Monev Dana Bergulir APBN, APBD, MKPL dan Monev BUKP. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan dana bergulir dan permasalahan yang dihadapi.
4. Rangkaian Hari Koperasi. Dalam rangka memperingati Hari Koperasi 2021 telah dilaksanakan Penilaian Kepatuhan Pelaporan Koperasi (Badan Hukum Kota dan Kantor Cabang), Lomba Tangkas Terampil Perkoperasian, Workshop/Sarasehan Hari Koperasi dan Prambanan Java Festival 2021.

Indikator kinerja sasaran nilai omset UKM usaha mikro didukung oleh terlaksananya Program Pemberdayaan UMKM dan Program Pengembangan UMKM. Program Pemberdayaan UMKM memiliki dua indikator kinerja program yakni jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan dan jumlah UKM ber-IUM. Target indikator kinerja jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan pada tahun 2021 sebesar 100 orang dan terealisasi sebesar 100 orang. Dengan demikian capaian kinerja indikator ini sebesar 100 %. Sedangkan indikator kinerja jumlah UKM ber-IUM tahun 2021 ditetapkan sebesar 400 UKM dan terealisasi sebesar 400 UKM. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini juga sebesar 100 %. Sebagai upaya untuk memenuhi target indikator kinerja tersebut, dilaksanakan satu kegiatan yakni Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan. Kegiatan itu terdiri dari 3 sub kegiatan, antara lain Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro, Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro dan Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro.

Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro memiliki satu ouput yakni Data Pelaku UKM. Pada tahun 2021 dilaksanakan pendataan pelaku UKM yang menyasar 1.350 UMKM. Pendataan dilakukan untuk mengetahui profil UMKM di Kota Yogyakarta sekaligus sebagai langkah verifikasi lapangan atas pendaftaran NIB/ data UMKM pada OSS (Online Single Submission).

Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro memiliki satu output yakni Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kemudahan perizinan usaha, dengan target 120 UMKM. Aktivitas yang dilakukan untuk mewujudkan output tersebut antara lain :

1. Diseminasi Pengetahuan Legalitas Usaha bagi Pelaku UMKM yang diselenggarakan sebanyak 2 angkatan dengan jumlah peserta masing-masing angkatan sebanyak 30 orang.
2. Diseminasi Peningkatan Kapasitas Usaha bagi Pelaku UMKM, diselenggarakan sebanyak 2 angkatan dengan peserta masing-masing angkatan sebanyak 30 orang.

Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro memiliki 2 output yakni Pemberdayaan wirausaha baru (100 wirausaha) dan Peningkatan kapasitas kelompok gandeng gendong (30 UMKM). Aktivitas yang dilakukan untuk mewujudkan output tersebut antara lain :

1. Diseminasi Peningkatan Kapasitas Kelompok Gandeng Gendong sebanyak satu angkatan, diikuti oleh 30 orang peserta.
2. Pelatihan Home Business Camp (HBC) yang diikuti oleh 50 orang peserta. Setelah mengikuti pelatihan, para peserta mendapatkan fasilitasi sewa tempat promosi dan pendampingan usaha oleh konsultan bisnis managemen.
3. Pelatihan Karang Mitra Usaha (KaMU) yang diikuti oleh 50 orang peserta. Seperti halnya peserta HBC, setelah mengikuti Pelatihan KaMU para peserta mendapatkan fasilitasi sewa tempat promosi dan pendampingan usaha oleh konsultan bisnis managemen.
4. Pelatihan Managemen Resiko bagi Wirausaha Baru yang diikuti oleh 50 orang peserta.

Program Pengembangan UMKM memiliki satu indikator kinerja program yakni Jumlah UKM Mandiri. Untuk memenuhi target kinerja program tersebut dilaksanakan satu kegiatan yakni Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil. Kegiatan tersebut terdiri dari satu sub kegiatan yakni Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi. Pada sub kegiatan ini terdapat beberapa output antara lain :

1. Kemitraan dengan Lembaga Pemerintah/Swasta
   Sebagai salah satu kegiatan yang berguna bagi pelaku usaha untuk menambah informasi bagi perbaikan produknya dan dapat memotivasi masyarakat untuk berwirausaha
2. Pameran dan promosi produk UMK
   Upaya mempromosikan produk-produk UMKM Kota Yogyakarta dilaksanakan di 2 kali
3. Kerjasama dan Promosi UMKM dengan Media Elektronik dan Media Cetak
   Upaya untuk mempromosikan dan memasarkan produk UMKM baik produk diluar daerah maupun di dalam daerah melalui media.

Indikator kinerja sasaran Kinerja sektor perindustrian meningkat membukukan capaian yang jauh melampaui target. Indikator nilai omset IKM ditargetkan sebsar Rp 124.377.964, tercapai sebesar Rp 1.241.421.600. Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh pelaksanaan 3 program antara lain Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Program Pengendalian Izin

Usaha Industri Kabupaten/Kota dan Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri memiliki satu indikator kinerja program yakni Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi, ditargetkan sebesar 3 % dan terealisasi sebesar 6,2 %. Dengan demikian capaian kinerja indikator ini sebesar 206 %. Sebagai upaya mencapai indikator kinerja tersebut, program ini melaksanakan satu kegiatan yakni Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kota. Kegiatan tersebut terdiri dari 3 sub kegiatan antara lain Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri dan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri.

Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota memiliki satu output yakni Dokumen FGD RPIK Yogyakarta sebanyak 1 dokumen. Aktivitas yang dilakukan antara lain FGD RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kota). Pelaksanaan aktivitas ini digabung dengan FGD Review Naskah Akademik pada Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri agar lebih efisien.

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri memiliki tiga output yakni :

1. Koordinasi terkait pengembangan sentra melalui kegiatan penyuluhan di sentra IKM. Aktivitas yang dilakukan adalah melakukan penyuluhan dan pendampingan bagi pengembangan sentra industry di Kota Yogyakarta yang menyasar pada 500 IKM.
2. Dokumen Amdal Lalin. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas. Penyusunan dokumen ini terkait dengan pembangunan gedung PDIN yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2022.
3. Dokumen UKL/UPL/Amdal. (Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan) adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan. Penyusunan dokumen ini masih berkaitan dengan pembangunan

gedung PDIN (Pusat Desain Industri Nasional). Dokumen ini menjadi sumber informasi tentang kondisi gedung PDIN dan lingkungan daerah sekitar gedung PDIN. Dengan adanya dokumen UKL-UPL ini pemerintah juga bisa membantu untuk pemantauan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup yang ada di daerah sekitar gedung PDIN.

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri diampu oleh dua eselon IV yakni Kepala Seksi Pembinaan Standarisasi Industri dan Kepala UPT (Unit Pelayanan Teknis) Logam. Kepala Seksi Pembinaan Standarisasi Industri mengampu lima output antara lain :

1. Pelatihan Bimbingan Teknis IKM. Pada tahun 2021 dilaksanakan Pelatihan Bimbingan Teknis bagi 80 IKM.
2. Pelatihan Bimbingan Sarana Produksi IKM. Pada tahun 2021 dilaksanakan Pelatihan Bimbingan Teknis bagi 280 IKM
3. Pendampingan HKI di 14 lokasi
4. Fasilitasi Dekranasda bagi 70 member Dekranasda
5. Monev IKM dalam Kelompok PEW, 540 IKM.

Sedangkan Kepala UPT Logam mengampu lima output, antara lain :

1. Kerjasama dengan industry dalam rangka pelibatan jejaring rantai pasok industry nasional. Tahun 2021 UPT Logam menjalin kerjasama dengan PT Juara Medica Indonesia dan PT Yogya Presisi Tehnikatama Industri. Dengan PT Juara Medica Indonesia, kerjasama yang dilakukan adalah memproduksi footrest kursi roda sebanyak 3.543 buah. Sedangkan dengan PT Yogya Presisi Tehnikatama Industri, kerjasama yang dilakukan adalah memproduksi 55.948 buah.
2. Optimalisasi Layanan UPT Logam selama 12 bulan. Aktivitas yang dilakukan adalah penunjang dari kegiatan operasional UPT Logam, misalnya penyediaan bahan-bahan bangunan dan konstruksi, BBM, pelumas, suku cadang kendaraan, bahan computer dan lain-lain.
3. Pemeliharaan Gedung dan Peralatan Mesin UPT Logam. Tahun 2021 UPT Logam melakukan pemeliharaan gedung berupa renovasi ruang dan melakukan pengadaan tapping unit untuk memperlancar operasional lembaga.
4. Penataan Sumber Daya Manusia dan Kapasitas Organisasi UPT Logam. Terdapat 21 orang pegawai Non ASN yang bertugas di UPT Logam, terdiri dari 1 orang Tenaga Bantuan (Naban) dan 20 orang Tenaga Teknis. Tenaga Teknis terdiri dari 17 orang Operator Mesin, 2 orang Desainer Mesin Industri

dan 2 orang Teknisi Peralatan dan Mesin. Para pegawai Non ASN inilah yang turut membantu menjalankan roda operasional UPT Logam.

5. Pengadaan Kipas Angin sebanyak 4 unit

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu penting yang dihadapi Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, antara lain :

1. Pemulihan dampak pandemic covid -19
2. Pemantapan RPIK
3. Penguatan sentra industry
4. Optimalisasi PDIN
5. Masih sedikitnya koperasi berbasis kewilayahan
6. Transformasi koperasi modern
7. Digitalisasi UMKM
8. Kelembagaan forkom UMKM, Dekranasda
9. Kemitraan, sinergitas antar elemen
10. Penguatan penggunaan produk dalam negeri

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Renja Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2023 - 2026. Rancangan Renstra Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2023-2026 menjadi dasar penyusunan Rancangan Renja Tahun 2023 dan menjadi materi penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah 2023 - 2026. Rancangan Renja Tahun 2023 akan dipergunakan sebagai materi pada pembahasan musrenbang Kota Yogyakarta Tahun 2023 untuk menyusun Rancangan Akhir RKPD Tahun 2023. Rancangan Renja selain memuat program dan kegiatan sesuai dengan tupoksi, juga memuat kegiatan-kegiatan kewilayahan yang berasal dari hasil musrenbang kelurahan dan kecamatan. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dapat dilihat pada tabel 2.3.

Dalam tabel 2.3 tersebut terlihat bahwa dibandingkan dengan pagu awal yang diusulkan, rencana kebutuhan anggaran program dan kegiatan tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp 332.334.218. Dari 10 program yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM, terdapat 2 program yang mengalami peningkatan anggaran. Kedua program tersebut antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dan Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi. Penambahan anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota digunakan untuk sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS sebesar Rp 358.519.582. Penambahan tersebut terkait dengan bertambahnya Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi digunakan untuk sub kegiatan Penilaian

Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 400.000.

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022

Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM

Lembar:… dari….

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**A (Nilai > 80 s.d 90)**	**6.603.643.273**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**A (Nilai > 80 s.d 90)**	**6.958.563.420**	**Bertambah**
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**10.677.000**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**11.287.000**	Bertambah
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen Renja Tahun 2023 dan Perubahan RenjaTahun 2022 dan Review Renstra	3 dokumen	3.677.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen Renja Tahun 2023 dan Perubahan RenjaTahun 2022 dan Review Renstra	3 dokumen	3.677.000	
			Forum OPD untuk kesepakatan penyusunan program dan kegiatan Perangkat Daerah	1 berita acara				Forum OPD untuk kesepakatan penyusunan program dan kegiatan Perangkat Daerah	1 berita acara		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2023, RKPA dan DPPA Tahun 2022	4 dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2023, RKPA dan DPPA Tahun 2022	4 dokumen	2.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen	4.610.000	

			Dokumen Evaluasi Kebijakan; Pelaksanaan; dan Hasil Renja OPD	6 dokumen				Dokumen Evaluasi Kebijakan; Pelaksanaan; dan Hasil Renja OPD	6 dokumen		
			Pengelolaan Website OPD	12 bulan				Pengelolaan Website OPD	12 bulan		
			Penyusunan Profil OPD,	1 Buku				Penyusunan Profil OPD,	1 Buku		
			Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	2 Dokumen				Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	2 Dokumen		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP) 2121 dan Dokumen Rancangan LKjIP 2022	2 Dokumen	1.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP) 2121 dan Dokumen Rancangan LKjIP 2022	2 Dokumen	1.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**5.418.230.848**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**5.774.711.430**	**Bertambah**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Gaji dan Tunjangan ASN	41 ASN	5.410.630.848	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Gaji dan Tunjangan ASN	41 ASN	5.769.150.430	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	1 dokumen	1.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	1 dokumen	425.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Bahan pelaksanaan verifikasi	1 dokumen	700.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Bahan pelaksanaan verifikasi	1 dokumen	556.000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 dokumen	1.200.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 dokumen	480.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	500.000	

	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Bahan tanggapan pemeriksaan	4 dokumen	1.000.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Bahan tanggapan pemeriksaan	4 dokumen	400.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen	2.700.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen	2.700.000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	500.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	500.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**307.779.145**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**299.088.710**	Berkurang
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 Jenis	2.935.700	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 Jenis	2.935.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Alat Tulis Kantor	53 Jenis	105.503.445	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Alat Tulis Kantor	53 Jenis	96.813.710	
			Bahan dan Peralatan Rumah Tangga	19 Jenis				Bahan dan Peralatan Rumah Tangga	19 Jenis		
			Cartridge printer	42 Dos				Cartridge printer	42 Dos		
			Flashdisk	34 Buah				Flashdisk	34 Buah		
			Refill tinta	63 Dos				Refill tinta	63 Dos		
			Toner printer	16 Tube				Toner printer	16 Tube		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Barang cetakan	4 Jenis	18.500.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Barang cetakan	4 Jenis	18.500.000	
			Penggandaan surat-surat/dokumen	60.000 Lembar				Penggandaan surat-surat/dokumen	60.000 Lembar		

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Surat Kabar selama 12 bulan	2 Jenis	2.400.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Surat Kabar selama 12 bulan	2 Jenis	2.400.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1. Makan minum rapat	31 kali	178.440.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1. Makan minum rapat	31 kali	178.440.000	
			2. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa)	6 kali				2. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa)	6 kali		
			3. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa	8 kali				3. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa	8 kali		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**546.216.280**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**552.766.280**	Berkurang
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Buku Cek	4 Buku	3.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Buku Cek	4 Buku	3.000.000	
			Materai	200 Lembar				Materai	200 Lembar		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Pembayaran Rekening Telepon	12 Bulan	6.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Pembayaran Rekening Telepon	12 Bulan	6.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jasa Keamanan Griya UMKM	12 Bulan	537.216.280	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jasa Keamanan Griya UMKM	12 Bulan	543.766.280	
			Jasa Pemeliharaan Kebersihan Kantor Dinas Perindustrian Koperasi UKM	12 Bulan				Jasa Pemeliharaan Kebersihan Kantor Dinas Perindustrian Koperasi UKM	12 Bulan		
			Jasa Pemeliharaan Kebersihan Kantor Griya UMKM	12 Bulan				Jasa Pemeliharaan Kebersihan Kantor Griya UMKM	12 Bulan		
			Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan	12 Bulan				Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan	12 Bulan		
			Tenaga Bantuan (NABAN)	2 Orang				Tenaga Bantuan (NABAN)	2 Orang		

			Tenaga Teknis	3 Orang				Tenaga Teknis	3 Orang		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**320.740.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**320.710.000**	Berkurang
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1. Pembayaran pajak kendaraan dinas roda 4	1 unit	18.990.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1. Pembayaran pajak kendaraan dinas roda 4	1 unit	21.280.000	
			2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas roda 4	1 unit				2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas roda 4	1 unit		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Pembayaran pajak kendaraan dinas operasional/lapangan roda 2	15 Unit	144.750.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Pembayaran pajak kendaraan dinas operasional/lapangan roda 2	15 Unit	142.430.000	
			Pembayaran pajak kendaraan dinas operasional/lapangan roda 4	5 Unit				Pembayaran pajak kendaraan dinas operasional/lapangan roda 4	5 Unit		
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional/lapangan roda 2	15 Unit				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional/lapangan roda 2	15 Unit		
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional/lapangan roda 4	5 Unit				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional/lapangan roda 4	5 Unit		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		AC	25 Unit	17.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		AC	25 Unit	17.000.000	
			Komputer	25 Unit				Komputer	25 Unit		
			LCD	3 Unit				LCD	3 Unit		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1. Gedung Griya UMKM	1 unit	140.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1. Gedung Griya UMKM	1 unit	140.000.000	

			2. Gedung Kantor DInas Perindustrian Koperasi UKM	1 unit				2. Gedung Kantor DInas Perindustrian Koperasi UKM	1 unit		
2	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**		**Jumlah Koperasi yang memiliki akuntabilitas baik**	**115 Koperasi**	**168.010.960**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**		**Jumlah Koperasi yang memiliki akuntabilitas baik**	**115 Koperasi**	**168.010.960**	
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		**Terwujudnya koperasi akuntabel dan patuh terhadap peraturan yang berlaku**	**115 koperasi**	**168.010.960**	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**		**Terwujudnya koperasi akuntabel dan patuh terhadap peraturan yang berlaku**	**115 koperasi**	**168.010.960**	Tetap
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		1. Laporan pelaksanaan Klinik Koperasi Sehat	30 Laporan	168.010.960	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		1. Laporan pelaksanaan Klinik Koperasi Sehat	30 Laporan	168.010.960	
			2. Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi	15 Koperasi				2. Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi	15 Koperasi		
			3. Laporan Pemeringkatan Koperasi (100 Koperasi)	1 Laporan				3. Laporan Pemeringkatan Koperasi (100 Koperasi)	1 Laporan		
			4. Pengawasan koperasi	8 Koperasi				4. Pengawasan koperasi	8 Koperasi		
3	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**		**Jumlah koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat**	**115 koperasi**	**69.750.000**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**		**Jumlah koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat**	**115 koperasi**	**70.150.000**	Bertambah

2.17.04.2.01.	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**Terwujudnya koperasi yang sehat**	**116 koperasi**	**69.750.000**	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**Terwujudnya koperasi yang sehat**	**116 koperasi**	**70.150.000**	
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Laporan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USPKoperasi KewenanganKab/Kota (105 Koperasi)	1 Laporan	13.185.000	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Laporan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USPKoperasi KewenanganKab/Kota (105 Koperasi)	1 Laporan	13.185.000	
2.17.04.2.01.02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Laporan Hasil Penilaian Koperasi berprestasi (20 koperasi)	1 Laporan	56.565.000	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Laporan Hasil Penilaian Koperasi berprestasi (20 koperasi)	1 Laporan	56.965.000	
4	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**		**Jumlah SDM Koperasi yang mempunyai kompetensi**	**565 orang**	**346.953.890**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**		**Jumlah SDM Koperasi yang mempunyai kompetensi**	**565 orang**	**346.953.906**	Tetap
2.17.05.2.01	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Terwujudnya penerapan pengetahuan hasil diklat untuk meningkatkan kualitas organisasinya**	**253 orang**	**346.953.890**	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Terwujudnya penerapan pengetahuan hasil diklat untuk meningkatkan kualitas organisasinya**	**253 orang**	**346.953.906**	
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		1. Bimtek bagi SDM Koperasi	125 Koperasi	346.953.890	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		1. Bimtek bagi SDM Koperasi	125 Koperasi	346.953.906	
			2. Pelatihan Motivasi Teknis Pengelolaan BUKP dan Pembinaan UMKM (anggota BUKP)	14 Orang				2. Pelatihan Motivasi Teknis Pengelolaan BUKP dan Pembinaan UMKM (anggota BUKP)	14 Orang		
5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**		Jumlah koperasi yang berkembang usahanya	15 unit	**377.593.100**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**		**Jumlah koperasi yang berkembang usahanya**	**15 unit**	**377.593.100**	Tetap

2.17.06.2.01	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		Terwujudnya produktivitas usaha koperasi dan tersedianya data perkembangan program dana bergulir		**377.593.100**	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Terwujudnya produktivitas usaha koperasi dan tersedianya data perkembangan program dana bergulir**		**377.593.100**	
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		1. Anggota Koperasi yang mengikuti Gelar Potensi Koperasi (2 orang x 3 pameran)	6 Orang	377.593.100	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		1. Anggota Koperasi yang mengikuti Gelar Potensi Koperasi (2 orang x 3 pameran)	6 Orang	377.593.100	
			2. Kelompok Pra Koperasi yang dibina	24 Kelompok				2. Kelompok Pra Koperasi yang dibina	24 Kelompok		
			3. Monitoring dan evaluasi dana bergulir	4 Jenis				3. Monitoring dan evaluasi dana bergulir	4 Jenis		
			4. Rangkaian Hari Koperasi	1 Kali				4. Rangkaian Hari Koperasi	1 Kali		
6	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)**		**Jumlah UKM ber-IUM**		**528.077.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)**		**Jumlah UKM ber-IUM**		**528.077.000**	Tetap
			Jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan					**Jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan**			

2.17.07.2.01	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**		**Wirausaha baru yang berlegalitas usaha dan naik kelas**	**402 UMKM**	**528.077.000**	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**		**Wirausaha baru yang berlegalitas usaha dan naik kelas**	**402 UMKM**	**528.077.000**	Tetap
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potnsi dan Pengembangan Usaha Mikro		Updating data UMKM	1350 UMKM	85.150.000	Pendataan Potnsi dan Pengembangan Usaha Mikro		Updating data UMKM	1350 UMKM	85.150.000	
2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro		Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kemudahan perizinan usaha	120 UMKM	22.950.000	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro		Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kemudahan perizinan usaha	120 UMKM	22.950.000	
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Pembinaan Kelompok Gandeng Gendong	100 Wirausaha	419.977.000	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Pembinaan Kelompok Gandeng Gendong	100 Wirausaha	419.977.000	
7	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**		**Jumlah UKM mandiri**	**30 UKM**	**656.702.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**		**Jumlah UKM mandiri**	**30 UKM**	**656.702.000**	Tetap
2.17.08.2.01	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**		**Jumlah UKM mandiri**	**30 UKM**	**656.702.000**	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**		**Jumlah UKM mandiri**	**30 UKM**	**656.702.000**	
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi		1. Kemitraan dengan lembaga Pemerintah/Swasta	2 Lembaga	656.702.000	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi		1. Kemitraan dengan lembaga Pemerintah/Swasta	2 Lembaga	656.702.000	
			2. Pameran dan promosi produk UKM	34 UKM				2. Pameran dan promosi produk UKM	34 UKM		

8	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**		**Persentase usaha industri yang mempunyai produk dan jasa terstandarisasi**	**3%**	**1.567.162.500**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**		**Persentase usaha industri yang mempunyai produk dan jasa terstandarisasi**	**3%**	**1.567.162.500**	Tetap
3.31.02.2.01	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**		**Data IKM yang memiliki standarisasi produk barang dan jasa**	**132 IKM**	**1.567.162.500**	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**		**Data IKM yang memiliki standarisasi produk barang dan jasa**	**132 IKM**	**1.567.162.500**	
3.31.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Draft Perda RPIK	1 Dokumen	9.250.000	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Draft Perda RPIK	1 Dokumen	9.250.000	
3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		Penyuluhan IKM pada 4 sentra	80 IKM	86.482.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		Penyuluhan IKM pada 4 sentra	80 IKM	86.482.000	
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		1. IKM yang mendapatkan pelatihan teknis produksi	460 IKM	1.471.430.500	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		1. IKM yang mendapatkan pelatihan teknis produksi	460 IKM	1.471.430.500	
			2. Monitoring dan Evaluasi IKM di Sentra	540 IKM				2. Monitoring dan Evaluasi IKM di Sentra	540 IKM		
			3. Fasilitasi dan pendampingan Dekranasda	70 IKM				3. Fasilitasi dan pendampingan Dekranasda	70 IKM		
			4. Pendampingan HKI	40 IKM				4. Pendampingan HKI	40 IKM		
9	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA**		**Persentase IKM yang berijin industri**	**1,60%**	**114.007.500**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA**		**Persentase IKM yang berijin industri**	**1,60%**	**114.007.500**	Tetap

3.31.03.2.01	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**		**IKM yang terfasilitasi IUI**	**100%**	**114.007.500**	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**		**IKM yang terfasilitasi IUI**	**100%**	**114.007.500**	
3.31.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		1. Sosialisasi Izin Usaha Industri (IUI) (20 orng per angkatan)	15 kali	114.007.500	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		1. Sosialisasi Izin Usaha Industri (IUI) (20 orng per angkatan)	15 kali	114.007.500	
			2. Fasilitasi IUI bagi IKM	300 IKM				2. Fasilitasi IUI bagi IKM	300 IKM		
10	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**		**Persentase Data Informasi Industri yang ter-update**	**100%**	**90.336.125**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**		**Persentase Data Informasi Industri yang ter-update**	**100%**	**84.512.000**	Berkurang
3.31.04.2.01.	**Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**		**Tersedianya data Industri Mikro Kecil di Kota Yogyakarta**	**2000 IKM**	**90.336.125**	**Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**		**Tersedianya data Industri Mikro Kecil di Kota Yogyakarta**	**2000 IKM**	**84.512.000**	
3.31.04.2.01.03	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas		Sosialisasi SIINas	150 IKM	90.336.125	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas		Sosialisasi SIINas	150 IKM	84.512.000	
Sub Total a					**10.522.236.348**	**Sub Total a**				**10.871.982.386**	
	UPT LOGAM				**2.282.900.000**	**UPT LOGAM**				**2.265.488.180**	Berkurang
3.31.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**A (Nilai > 80 s.d 90)**	**437.900.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**A (Nilai > 80 s.d 90)**	**437.900.000**	

3.31.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**		**Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**437.900.000**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**		**Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**437.900.000**	
3.31.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Layanan UPT Logam	12 Bulan	437.900.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Layanan UPT Logam	12 Bulan	437.900.000	
			Pemeliharaan Peralatan UPT Logam	12 Bulan				Pemeliharaan Peralatan UPT Logam	12 Bulan		
			Pengadaan Alat-alat Pendukung Pelayanan UPT Logam	7 unit				Pengadaan Alat-alat Pendukung Pelayanan UPT Logam	7 unit		
3.31.02.	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**		Pendapatan UPT Logam	437.900.000	**1.845.000.000**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**		Pendapatan UPT Logam	437.900.000	**1.827.588.180**	
3.31.02.2.01	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**		Pelayanan terhadap semua pelanggan UPT Logam	100%	**1.845.000.000**	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**		Pelayanan terhadap semua pelanggan UPT Logam	100%	**1.827.588.180**	
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		1. Kerjasama dengan industri untuk mendukung jejaring rantai pasok industri nasional	2 kerjasama	1.845.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		1. Kerjasama dengan industri untuk mendukung jejaring rantai pasok industri nasional	2 kerjasama	1.827.588.180	
			2. Pendukung layanan UPT Logam	12 bulan				2. Pendukung layanan UPT Logam	12 bulan		
			3. Pemeliharaan gedung dan peralatan mesin UPT Logam	12 bulan				3. Pemeliharaan gedung dan peralatan mesin UPT Logam	12 bulan		
			4. Penataan Sumber Daya Manusia UPT Logam	12 bulan				4. Penataan Sumber Daya Manusia UPT Logam	12 bulan		
Sub Total b					**2.282.900.000**	**Sub Total b**				**2.265.488.180**	
Total					**12.805.136.348**	**Total**				**13.137.470.566**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja tahun 2022, Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah memperhatikan usulan program dan kegiatan yang diperoleh dari para pemangku kepentingan (stakeholders), antara lain kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, serta dari berbagai informasi dalam pelaksanaan musrenbang. Adapun usulan-usulan tersebut disesuaikan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, seperti yang sudah dijabarkan pada sub bab 2.3, yang memuat isu penting Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

Usulan program dan kegiatan masyarakat yang dirangkum Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dapat dilihat dalam Tabel 2.4. Secara umum, usulan tersebut meliputi pelatihan teknis industri, pembinaan pelaku UMKM, promosi produk, pembinaan kelompok pra koperasi dan bimtek bagi pengurus koperasi.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri				
	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kota Yogyakarta	Pelatihan Batik	3 angkatan	
			Pelatihan Sibori	2 angkatan	
			Pelatihan Ecoprint	2 angkatan	
			Pelatihan Pengemasan	4 angkatan	
			Pelatihan Sablon Kaos	4 angkatan	
			Pelatihan Pengolahan Makanan	3 angkatan	
			Pelatihan Souvenir	2 angkatan	
			Pelatihan Kerajinan Kulit	1 angkatan	
			Pelatihan Surjan	1 angkatan	
			Pelatihan Perak	1 angkatan	
2	Program Pengembangan UMKM				
	Kegiatan Pengembangan Usaha Mirko dengan Orientasi Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				

	Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran serta Desain dan Teknologi	Kota Yogyakarta	Promosi produk UMKM	120 UMKM	
3	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)				
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kota Yogyakarta	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	121 UMKM	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kota Yogyakarta	Pembinaan Kelompok Gandeng Gendong	100 Wirausaha	
			Penumbuhan wirausaha baru		
4	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi				
	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				
	Sub Kegiatan Pemberdayaan, Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta	Kelompok Pra Koperasi yang dibina	24 Kelompok	
5	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian				
	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				
	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kota Yogyakarta	Bimtek bagi SDM Koperasi	125 Koperasi	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan tentang perlunya perencanaan strategis di tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah. Perencanaan daerah dalam bentuk dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah merupakan manifestasi kontrak politik Walikota Yogyakarta terpilih yang harus didukung dengan rencana kerja yang sistematis dari masing-masing unit kerja, sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pasal 150 ayat (3) huruf (b) dan (c).

Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, untuk lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, difokuskan pada bidang kewenangan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Adapun program yang disusun menurut kewenangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 32 ayat (1) yang berbunyi klasifikasi belanja menurut urusan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) terdiri dari belanja Urusan Wajib dan belanja Urusan Pilihan.

Renja Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta merupakan penjabaran Rencana Strategis Tahun 2017-2022 (Program jangka menengah 5 tahunan) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Tahun 2022 adalah sebagaimana berikut :

a. Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka menengah Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta adalah ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta, yang merupakan misi kedua Pemerintah Kota Yogyakarta.

b. Sasaran

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM pada tahun 2022 adalah

Bidang Urusan	Sasaran	Indikator Sasaran
Koperasi	Omset koperasi	Nilai Omset Koperasi Tahun n
UKM	Omset UMKM	Nilai Omset UKM Usaha Mikro Tahun n
Industri	Omset IKM	Nilai Omset IKM Tahun n

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan sasaran perangkat daerah tersebut di atas, beberapa program dan kegiatan dilaksanakan di Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut ditetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Strategi Daerah	Arah Kebijakan
a. Pengoptimalan Kualitas Koperasi	- Meningkatan pembinaan kelembagaan koperasi - Meningkatkan pembinaan dan pengembangan koperasi
b. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil mikro	- Meningkatkan fasilitasi kemitraan dan Pembiayaan Bagi Pelaku UMK - Menumbuhkan wirausaha baru - Meningkatkan Pengembangan, Konsultasi Bisnis dan Manajemen bagi Usaha Mikro

c.	Pengembangan industri kecil dan mikro	- Meningkatkan kualitas produksi industri kecil dan mikro - Menyusun rencana induk pengembangan industri - Memperkuat UPT Logam

Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM melaksanakan 9 program, 15 kegiatan dan 39 sub kegiatan. Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut antara lain :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program ini terdiri dari 6 (enam) kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yakni :

   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   Kegiatan ini terdiri dari 8 (delapan) sub kegiatan :

   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
   d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
   e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
   g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
   h. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

   Kegiatan ini terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan :

   a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan :

   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan :

   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

6. Peningkatan Pelayanan BLUD

   Kegiatan ini terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan

   a. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

II. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini teridiri dari 1 (satu) kegiatan, yakni :

1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

   Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan :

   a. Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

III. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan :

1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

   Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan :

   a. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
   b. Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

IV. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan :

1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

   Kegiatan ini terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan :

   a. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

V. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan :

1. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

   Kegiatan ini terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan :

   a. Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

VI. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan :

1. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

   Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan

   a. Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
   b. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
   c. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

VII. Program Pengembangan UMKM

Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan :

1 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

   Kegiatan ini terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan :

   a. Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi

VIII. Program Perencanaan Pembangunan Industri

Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan :

1 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

   Kegiatan ini terdiri atas 3 (tiga) sub kegiatan :

a. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
c. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

VIII. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan :

1. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota

   Kegiatan ini terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan :

   a. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

IX. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan :

1. Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

   Kegiatan ini terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan :

   a. Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta merupakan program yang telah diamanatkan dalam RPJMD Kota Yogyakarta sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rencana program beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta kedalam rencana kegiatan untuk setiap program tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta dan diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan beserta kebutuhan pendanaannya.

Program dan kegiatan yang tertuang di dalam dokumen Rencana kerja ini bersifat indikatif dan tentatif, dalam artian bahwa seluruh data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana kerja ini merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak bersifat kaku. Rumusan program, kegiatan dan pendanaan indikatif Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta tahun 2023 selengkapnya disajikan pada Tabel 4.1.

Total anggaran Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM tahun anggaran 2023 sebesar Rp 11.946.681.110. Sebesar Rp 7.087.748.925 digunakan untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, baik yang dilaksanakan oleh Dinas induk maupun UPT yang dimiliki, yakni UPT Logam. Anggaran untuk urusan bidang koperasi sebesar Rp 787.408.915 yang digunakan untuk mendukung 4 (empat) program. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi sebesar Rp 149.335.000, Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi sebesar Rp 72.000.000, Program Pendidikan dan Latihan

Perkoperasian sebesar Rp 290.809.523 dan Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi sebesar 275.264.392. Sedangkan anggaran untuk urusan bidang UMKM sebesar Rp 1.174.365.230 untuk mendukung pelaksanaan 2 (dua) program. Anggaran Program Pengembangan UMKM sebesar Rp 629.558.570 dan Program Pemberdayaan UMKM sebesar Rp 544.806.660.

Anggaran urusan bidang industri sebesar Rp 3.395.000.680 untuk mendukung pelaksanaan 3 (tiga) program yang dilaksanakan Dinas induk maupun UPT Logam. Anggaran Program Perencanaan dan Pembangunan Industri sebesar Rp 2.897.158.040, yang dijalankan oleh Dinas induk dan UPT Logam. Anggaran Program Perencanaan dan Pembangunan Industri yang diampu oleh Bidang Industri sebesar Rp 869.398.690. Sedangkan Program Perencanaan dan Pembangunan Industri yang diampu oleh UPT Logam mendapat dukungan anggaran sebesar Rp 1.945.932.150. Dua program lainnya yakni Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp 8.360.000 dan Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dengan anggaran sebesar Rp 73.467.200.

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.31.2.17.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 3.31.2.17.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**								**8,624,413,070**					**10,095,321,589**
2	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**6,662,638,925**					**7,751,226,731**
2	**17**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**8,115,000**					**10,200,000**
2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersedia		A Nilai	4 Dokumen	16 Dokumen	3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	3,300,000
2	17	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersedia		A Nilai	1 Dokumen	16 Dokumen	830,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	1,300,000
2	17	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersedia		A Nilai	1 Dokumen	16 Dokumen	500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	500,000
2	17	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersedia		A Nilai	1 Dokumen	16 Dokumen	785,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	1,300,000
2	17	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersedia		A Nilai	1 Dokumen	16 Dokumen	500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	500,000
2	17	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersedia		A Nilai	1 Laporan	16 Dokumen	1,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	2,300,000
2	17	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersedia		A Nilai	2 Laporan	16 Dokumen	1,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	1,000,000
2	**17**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**5,656,062,100**					**6,361,772,205**
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima TPP	Laporan administrasi keuangan Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM		A Nilai	33 Orang/bulan 33 orang/bulan	7 Laporan	5,651,962,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	6,355,400,205
2	17	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan administrasi keuangan Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM		A Nilai	1 Dokumen	7 Laporan	500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	500,000
2	17	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan administrasi keuangan Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM		A Nilai	1 Dokumen	7 Laporan	500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	500,000
2	17	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan administrasi keuangan Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM		A Nilai	1 Laporan	7 Laporan	500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	500,000
2	17	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Laporan administrasi keuangan Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM		A Nilai	1 Dokumen	7 Laporan	500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	500,000
2	17	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan administrasi keuangan Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM		A Nilai	12 Laporan	7 Laporan	1,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	3,872,000
2	17	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan administrasi keuangan Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM		A Nilai	1 Dokumen	7 Laporan	500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	500,000

2	**17**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**3,000,000**					**3,000,000**
2	17	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan administrasi barang milik daerah		A Nilai	1 Dokumen	6 Laporan	500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	500,000
2	17	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan administrasi barang milik daerah		A Nilai	1 Dokumen	6 Laporan	500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	500,000
2	17	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan administrasi barang milik daerah		A Nilai	1 Laporan	6 Laporan	500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	500,000
2	17	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan administrasi barang milik daerah		A Nilai	1 Laporan	6 Laporan	500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	500,000
2	17	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan administrasi barang milik daerah		A Nilai	2 Laporan	6 Laporan	500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	500,000
2	17	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan administrasi barang milik daerah		A Nilai	1 Dokumen	6 Laporan	500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	500,000
2	**17**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**500,000**					**500,000**
2	17	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Laporan administrasi kepegawaian Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM		A Nilai	5 Dokumen	1 Dokumen	500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	500,000
2	**17**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**201,611,350**					**186,354,150**
2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan administrasi umum yang tersusun		A Nilai	6 Paket	5 Dokumen	70,177,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	88,133,750
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Laporan administrasi umum yang tersusun		A Nilai	2 Paket	5 Dokumen	17,314,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	19,500,000
2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Laporan administrasi umum yang tersusun		A Nilai	2 Dokumen	5 Dokumen	1,980,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	2,200,000
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan administrasi umum yang tersusun		A Nilai	3 Laporan	5 Dokumen	112,140,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	76,520,400
2	**17**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**15,200,000**					**185,000,000**
2	17	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Barang yang tersedia		A Nilai	2 unit	6 Jenis	4,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	0
2	17	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Barang yang tersedia		A Nilai	1 Unit	6 Jenis	11,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	185,000,000
2	**17**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**564,168,200**					**732,882,876**
2	17	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa penunjang urusan yang tersedia		A Nilai	2 Laporan	3 Jenis	1,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	2,000,000
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jasa penunjang urusan yang tersedia		A Nilai	2 Laporan	3 Jenis	3,960,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	4,200,000
2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jasa penunjang urusan yang tersedia		A Nilai	6 Laporan	3 Jenis	559,208,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	726,682,876

2	**17**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**213,982,275**					**271,517,500**
2	17	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Barang yang terpelihara		A Nilai	1 Unit	5 Jenis	23,220,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	21,828,400
2	17	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Barang yang terpelihara		A Nilai	20 Unit	5 Jenis	130,762,275	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	149,689,100
2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Barang yang terpelihara		A Nilai	1 Unit	5 Jenis	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	100,000,000
2	**17**	**03**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**								**149,335,000**					**195,871,944**
2	**17**	**03**	**2.01**		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**								**149,335,000**					**195,871,944**
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang memiliki akuntabilitas baik	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Klinik Koperasi Sehat Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Pemeringkatan Koperasi Pengawasan Koperasi	Koperasi yang diawasi		115 Koperasi	115 Unit Usaha 40 Koperasi 20 Koperasi 50 Koperasi 5 Koperasi	115 Unit	149,335,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Koperasi yang memiliki akuntabilitas baik	115 Koperasi	195,871,944
2	**17**	**04**			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**								**72,000,000**					**82,546,200**
2	**17**	**04**	**2.01**		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**								**72,000,000**					**82,546,200**
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Koperasi yang dinilai		115 Koperasi	115 Unit Usaha	115 Unit	12,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat	115 Koperasi	68,086,700
2	17	04	2.01	02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	Koperasi yang dinilai		115 Koperasi	20 Unit Usaha	115 Unit	59,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat	115 Koperasi	14,459,500
2	**17**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**								**290,809,523**					**349,303,006**
2	**17**	**05**	**2.01**		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**290,809,523**					**349,303,006**
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM Koperasi yang mempunyai kompetensi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	SDM Koperasi yang terdidik		540 SDM Koperasi	540 Orang	540 Orang	290,809,523	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah SDM Koperasi yang mempunyai kompetensi	540 SDM Koperasi	349,303,006
2	**17**	**06**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**								**275,264,392**					**329,394,862**
2	**17**	**06**	**2.01**		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**275,264,392**					**329,394,862**
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang berkembang usahanya	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Koperasi yang terbina		12 Unit	12 Unit Usaha	12 Unit	275,264,392	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah koperasi yang berkembang usahanya	12 Unit	329,394,862
2	**17**	**07**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**								**544,806,660**					**576,317,232**
2	**17**	**07**	**2.01**		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**								**544,806,660**					**576,317,232**
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UKM ber-NIB Jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Pelaku usaha yang terbina		400 UKM 100 UKM	1 Dokumen	620 Orang	161,847,160	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah UKM ber-NIB Jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan	400 UKM 100 UKM	223,387,732
2	17	07	2.01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah UKM ber-NIB Jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Informasi Perizinan Berusaha	Pelaku usaha yang terbina		400 UKM 100 UKM	400 UMKM	620 Orang	13,652,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah UKM ber-NIB Jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan	400 UKM 100 UKM	22,929,500
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UKM ber-NIB Jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Pelaku usaha yang terbina		400 UKM 100 UKM	100 Wirausaha baru	620 Orang	369,307,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah UKM ber-NIB Jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan	400 UKM 100 UKM	330,000,000
2	**17**	**08**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**								**629,558,570**					**810,661,614**
2	**17**	**08**	**2.01**		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**								**629,558,570**					**810,661,614**
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah UKM Mandiri	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	UMKM terfasilitasi		35 UKM	265 Unit Usaha	265 UMKM	629,558,570	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah UKM Mandiri	35 UKM	810,661,614

3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**													
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**								**951,225,890**					**1,285,000,000**
3	**31**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**								**869,398,690**					**1,105,000,000**
3	**31**	**02**	**2.01**		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**								**869,398,690**					**1,105,000,000**
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi meningkat	Fasilitasi promosi produk IKM Jumlah IKM yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan Workshop Dekranasda	Dokumen perencanaan industri		11 %	60 IKM 100 IKM 40 IKM	3 Dokumen	498,252,950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi meningkat	11 %	600,000,000
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi meningkat	Diseminasi Konsep Industri Hijau di Kota Yogyakarta Kajian Naskah Akademik pemanfaatan aset daerah di PDIN	Dokumen perencanaan industri		11 %	1 Kegiatan 1 Dokumen	3 Dokumen	78,445,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi meningkat	11 %	120,000,000
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi meningkat	IKM yang mendapatkan Pemantauan dari Fasilitator Perindustrian Penguatan Kelembagaan Sentra Kepada IKM Kota Yogyakarta Penyuluhan Sentra IKM Kota Yogyakarta	Dokumen perencanaan industri		11 %	30 Sentra 90 IKM 6 Sentra	3 Dokumen	292,700,740	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi meningkat	11 %	385,000,000
3	**31**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**								**8,360,000**					**20,000,000**
3	**31**	**03**	**2.01**		**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**								**8,360,000**					**20,000,000**
3	31	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase IKM yang berijin industri	Helpdesk Pengurusan Izin untuk IKM Monitoring Lapangan terkait Izin Usaha Industri di OSS RBA	Laporan kooridinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan industri		3 %	50 IKM 20 IKM	2 Dokumen	8,360,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase IKM yang berijin industri	3 %	20,000,000
3	**31**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**								**73,467,200**					**160,000,000**
3	**31**	**04**	**2.01**		**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**								**73,467,200**					**160,000,000**
3	31	04	2.01	02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Persentase Data Informasi Industri yang ter-update	Diseminasi informasi database Pendataan dan Updating data IKM	Data IKM yang terpublikasi		100 %	2 Kegiatan 3000 IKM	1 Dokumen	73,467,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Data Informasi Industri yang ter-update	100 %	160,000,000
												TOTAL	**9,575,638,960**					**11,380,321,589**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.31.2.17.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 3.31.2.17.0.00.01.0001 UPT Logam

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**													
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**								**2,371,042,150**					**1,960,537,978**
3	**31**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**425,110,000**					**425,110,000**
3	**31**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**425,110,000**					**425,110,000**
3	31	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pendapatan UPT Logam	Kerjasama dengan industri untuk mendukung jejaring rantai pasok industri nasional Layanan UPT Logam Pemeliharaan Peralatan Kantor UPT Logam Pengadaan Laptop dan Printer Operasional UPT Logam Pengadaan Robotik Webcam	Layanan UPT Logam		425.110.000 rupiah	2 Kerjasama 12 Bulan 2 Kali 4 Unit 1 Unit	1 Unit Kerja	425,110,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pendapatan UPT Logam	425.110.000 rupiah	425,110,000
3	**31**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**								**1,945,932,150**					**1,535,427,978**
3	**31**	**02**	**2.01**		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**								**1,945,932,150**					**1,535,427,978**
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi meningkat	Pemeliharaan Peralatan Mesin UPT Logam Penataan Sumber Daya Manusia Pendukung Layanan PDIN Pendukung Layanan UPT Logam	Tersedianya Dokumen RPIK dan terfasilitasinya IKM dalam Penyuluhan Sentra IKM, Pelatihan Sarana Produksi dan Teknis Industri, Monev dan Pendampingan IKM		11 %	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	3 Dokumen	1,945,932,150	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi meningkat	11 %	1,535,427,978
												TOTAL	**2,371,042,150**					**1,960,537,978**

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2022 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan selain merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD.

Renja Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2022 ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Capaian pelaksanaan Renja 2021 yang optimal diharapkan akan mendukung secara signifikan tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Perubahan Renstra Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta 2017- 2022. Dengan demikian pada akhirnya dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta.